

Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur

Muhammad Jarkasih¹, Dr. Titin Ruliana², Ida Rachmawati³
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : anijar69@gmail.com

Kata Kunci :

ABSTRAKSI

Efektivitas, Efisiensi,
Anggaran

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan anggaran belanja Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 sudah efektif dilihat dari analisis efektivitas; Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan anggaran belanja Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 sudah efisien dilihat dari analisis efisiensi.

Dasar teori yang digunakan merupakan landasan teori yang menyangkut akuntansi sektor publik, akuntansi pemerintah dan laporan realisasi anggaran.

Alat analisis yang digunakan adalah analisis belanja yang terdiri dari : analisis efektivitas dan analisis efisiensi.

Hasil penelitian yang dikemukakan adalah : Pelaksanaan anggaran belanja pada tahun anggaran 2018 dan 2020 dilihat dari analisis efektivitas pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dinilai cukup efektif berada pada angka 80-an%, sedangkan pada tahun anggaran 2019 dinilai efektif berada pada angka 90-an% sehingga hipotesis pertama diterima; Pelaksanaan anggaran belanja pada tahun anggaran 2018 s/d 2020 dilihat dari analisis efisiensi pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dinilai tidak efisien berada pada angka 100% keatas sehingga hipotesis kedua ditolak.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tuntutan transparansi mendorong adanya suatu pengukuran atau penilaian kinerja di instansi pemerintah daerah, hal ini menjadi sorotan karena semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik. Masyarakat sering menilai organisasi sektor publik sebagai sarang in-efisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Masyarakat yang semakin cerdas dan kritis juga menuntut dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik.

Masyarakat ingin agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam melaksanakan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah menjadi UU No. 23 Tahun 2014 digunakan sebagai dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam menciptakan *good governance*, yaitu pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel.

Guna menjalankan tugasnya Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur belum dapat bekerja secara maksimal karena masih banyaknya hambatan yang dihadapi. Hal ini tergambar melalui pengamatan langsung yang pernah dilakukan oleh penulis ketika menemui para petani di daerah penghasil padi dan masyarakat sebagai konsumen.

Fenomena masalah yang terjadi adalah adanya keluhan- keluhan lain dari para petani Provinsi Kalimantan Timur ini meliputi masalah hama, biaya produksi yang tidak sebanding dengan hasil yang didapat, peralatan pertanian belum sepenuhnya mendukung bagi petani masih bersifat tradisional dan adanya alih fungsi lahan akibat banyaknya kebutuhan umum dan masih banyak lagi. Berdasarkan tujuan Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur yang memberikan pelayanan di bidang pertanian, munculnya beberapa permasalahan dan keluhan ini mengidentifikasi bahwa pelayanan yang diberikan Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur belum sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga perlu perhatian khusus atas realisasi pelaksanaan anggaran belanja yang dilaksanakan. Sehingga perlu dilakukan evaluasi dengan melakukan analisis pelaksanaan atas anggaran belanja di Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

Tolak ukur dalam anggaran belanja suatu organisasi baik organisasi swasta maupun organisasi sektor publik diantaranya adalah efektifitas dan efisiensi. Efektifitas dan efisiensi anggaran belanja merupakan salah satu prinsip dalam penyelenggaraan suatu organisasi, untuk dapat mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan anggaran belanja Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 sudah efektif.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan anggaran belanja Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 sudah efisien.

Pengertian Anggaran Sektor Publik

Menurut Mahmudi (2016 : 59) pengertian anggaran sektor publik adalah "...*blue print* organisasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta masa depan yang akan diwujudkan".

Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah (APBD)

Pengertian APBD Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:60) adalah : “Rencana keuangan yang dibuat pemerintah daerah setiap tahunnya, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)”.

Pendapatan Daerah

Menurut Undang - Undang No. 32 tahun 2004 Pendapatan Daerah, adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja Daerah

Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 belanja daerah adalah : “Semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”.

Laporan Realisasi Anggaran Publik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa :

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Efektivitas

Menurut Mahmudi (2019: 86) : “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan”.

Rasio Efektivitas

Menurut Prasetyo, W. H & Nugraheni, A. P (2020:6) untuk mengetahui presentase tingkat efektivitas harus menggunakan pengukuran rasio efektivitas. Pengukuran rasio ini dilakukan dengan cara membagi realisasi dengan anggaran dinas.

Efisiensi

Menurut Abdul dan Muhammad (2019: 163) : “Efisiensi yaitu rasio yang membandingkan antara input yang digunakan terhadap output yang dihasilkan”.

Rasio Efisiensi

Menurut Prasetyo, W. H & Nugraheni, A. P (2020:6) menghitung efisiensi penyerapan anggaran maka harus membandingkan anggaran belanja dinas dengan realisasinya.

Hipotesis

Berdasarkan identifikasi masalah dan dasar teori yang diajukan, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Pelaksanaan anggaran pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2018-2020 efektif dilihat dari analisis rasio efektifitas.
2. Pelaksanaan anggaran pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2018-2020 efisien dilihat dari analisis rasio efisiensi.

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah definisi yang dibuat spesifik sesuai dengan kriteria pengujian atau pengukuran, dibentuk dengan cara mencari indikator empiris konsep. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi Anggaran pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
- b. Rasio Efektivitas adalah perbandingan realisasi belanja dengan target anggaran belanja Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Rasio Efisiensi adalah perbandingan realisasi belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

Jangkauan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur khususnya data yang ingin diteliti yaitu Laporan Realisasi Anggaran, tahun 2018 sampai dengan 2020.

Rincian Data Yang Diperlukan

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini terdiri atas :

1. Gambaran umum Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2. Struktur Organisasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur
3. Data Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur periode Tahun Anggaran 2018 s/d Tahun Anggaran 2020
4. Data lain yang diperlukan dalam penelitian ini seperti uraian tugas dan fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa alat analisis perbandingan dan tabel yang menjabarkan laporan perhitungan Anggaran Dan Realisasi Anggaran pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

Analisis Efektivitas

Menurut Prasetyo, W. H & Nugraheni, A. P (2020:6) untuk mengetahui presentase tingkat efektivitas harus menggunakan pengukuran rasio efektivitas. Pengukuran rasio ini dilakukan dengan cara membagi realisasi dengan anggaran dinas.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja Dinas}}{\text{Anggaran Belanja Dinas}} \times 100 \%$$

Sumber : Prasetyo, W. H & Nugraheni, A.P (2020:6)

Tabel 1. Kategori Efektivitas Belanja

Presentasi Pengukuran	Kriteria Efektifitas
100% Keatas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60 % - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Kep. Mendagri No. 690.900-327 Tahun 1996

Analisis Efisiensi

Menurut Prasetyo, W. H & Nugraheni, A. P (2020:6) menghitung efisiensi penyerapan anggaran maka harus membandingkan membandingkan anggaran belanja dinas dengan realisasinya.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Anggaran Dinas}}{\text{Realisasi Anggaran Dinas}} \times 100 \%$$

Sumber : Prasetyo, W. H & Nugraheni, A.P (2020:6)

Tabel 2. Kategori Efisiensi Belanja

Presentasi Pengukuran	Kriteria Efisiensi
100% Keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60 % - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Kep. Mendagri No. 690.900-327 Tahun 1996

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan hasil analisis pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2018 , 2019 dan 2020 sebagai berikut :

1. Hipotesis diterima jika pelaksanaan anggaran pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2018-2020 efektif dilihat dari analisis rasio efektifitas. Sebaliknya hipotesis ditolak jika pelaksanaan anggaran tidak efektif.
2. Hipotesis diterima jika pelaksanaan anggaran pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2018-2020 efisien dilihat dari analisis rasio efisiensi. Sebaliknya hipotesis ditolak jika pelaksanaan anggaran tidak efisien

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Dan Efisiensi

Rasio efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2018 s/d 2020 dapat dilihat di tabel 3

Tabel 3. Analisis Efektivitas & Efisiensi Belanja Tahun 2018 s/d 2020

No	Tahun	Tingkat Efektivitas (%)	Keterangan	Tingkat Efisiensi (%)	Keterangan
1	2018	85,57	Cukup Efektif	116,87	Tidak Efisien
2	2019	92,56	Efektif	108,03	Tidak Efisien
3	2020	89,70	Cukup Efektif	111,49	Tidak Efisien

Sumber : Hasil Penelitian Diolah

Pembahasan

Hasil penelitian Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan laporan realisasi anggaran belanja adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan perhitungan dan hasil analisis menggunakan metode perhitungan rasio efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2018 – 2020 mengalami perubahan nilai presentase (bervariatif). Di tahun 2018 presentase tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur sebesar 85,57 %, artinya bahwa pelaksanaan anggaran belanjanya cukup efektif dan di tahun 2019 tingkat efektivitasnya mengalami peningkatan dengan presentase sebesar 92,56 % dengan jumlah presentase tersebut pelaksanaan anggaran belanja di tahun 2019 dapat dikatakan efektif. Namun ditahun 2020 presentase tingkat efektivitasnya menurun menjadi 89,70 %, ini dapat diartikan bahwa efektivitas pelaksanaan anggaran belanja mengalami penurunan dengan kategori cukup efektif. Adapun yang menyebabkan analisis efektivitas ini cukup efektif hingga efektif karena realisasi anggaran belanja yang memiliki perbedaan yang jauh berbeda dengan target anggaran belanja yang harus dicapai sehinggalah mempengaruhi kriteria efektivitas pelaksanaan anggaran belanja. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa kegiatan yang dianggarkan tapi tidak dapat direalisasikan secara maksimal. Seperti pada tahun 2018 pada program peningkatan ketersediaan energi dan protein berdasarkan laporan realisasi anggaran. (pada lampiran halaman 63) capaiannya hanya sebesar 50,41 % dimana anggarannya sebesar Rp. 1.544.600.000 tapi realisasinya hanya sebesar Rp. 778.685.362 sehingga menyisakan anggaran sebesar Rp 765.914.638. Jika realisasi anggaran belanja lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran belanja, maka semakin efektif pelaksanaan belanja anggaran

Menurut Menurut Mahmudi (2019: 86) : “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan”.

Tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur fluktuasi (naik turun). Dilihat dari perbandingan pada tabel 1 dan tabel 4 seperti dibawah ini :

Tabel 4. Tabel Perbandingan Kriteria Efektivitas

Tahun	Presentasi Pengukuran	Kriteria Efisiensi	Tingkat Efisiensi Belanja Anggaran (%) (Hasil Penelitian)	Keterangan
2018	90% - 100%	Efektif	92,56	Efektif
2019	80% - 90%	Cukup Efektif	89,70	Cukup Efektif
2020	80% - 90%	Cukup Efektif	85,57	Cukup Efektif

Sumber : Hasil Penelitian Diolah

Pada tahun 2018 dan 2020 presentase tingkat efektivitas penyerapan anggaran diangka 80-an%. Sedangkan di tahun 2019 presentase tingkat efektivitas meningkat di angka 90-an%. Anggaran pada tahun 2019 lebih besar daripada tahun 2018 dan 2020. Dengan anggaran yang memadai mampu mendukung pencapaian target dalam perjanjian kinerja maupun total program/kegiatan secara keseluruhan. Sehingga presentase tingkat efektivitas di tahun 2019 (efektif) dibandingkan tahun 2018 (cukup efektif) dan 2020 (cukup efektif).

Supaya tercapainya pelaksanaan anggaran yang efektif diperlukan perbaikan perencanaan program dan kegiatan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur, Rencana Strategis (RENSTRA), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Tahun 2018-2023. Selain itu juga diperlukan koordinasi serta kerja sama antar pegawai disetiap bidang maupun antara pihak pengambil kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Dengan koordinasi tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya. Pelaksanaan koordinasi teknis baik internal maupun dengan instansi terkait atau lintas sektoral sangat diperlukan dalam hal perencanaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan.

2. Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur

Pada tabel 4 menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran belanja Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2018 sampai 2020 tidak efisien. Di tahun 2018 saja tingkat efisiensi anggaran belanja sebesar 116,87 % yang artinya bahwa penyerapan anggaran tidak efisien. Penyerapan anggaran yang tidak efisien berarti program – program Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dicapai dengan biaya yang lebih tinggi. Sedangkan pada tahun 2019 presentase tingkat efisiensi anggaran belanja sebesar 108,03 %, ini artinya penyerapannya Tidak Efisien. Pada tahun 2020 presentase tingkat efisiensi anggaran belanja mengalami peningkatan diangka 111,49 %, ini dapat diartikan bahwa penyerapan anggarannya tidak efisien. Tidak Efisien karena presentasinya masih diatas 100%.

Dilihat dari perbandingan tabel 2 dengan 5 seperti dibawah ini :

Tabel 5. Tabel Perbandingan Kriteria Efisiensi

Tahun	Presentasi Pengukuran	Kriteria Efisiensi	Tingkat Efisiensi Belanja Anggaran (%) (Hasil Penelitian)	Keterangan
2018	100% Keatas	Tidak Efisien	116,87	Tidak Efisien
2019	100% Keatas	Tidak Efisien	108,03	Tidak Efisien
2020	100% Keatas	Tidak Efisien	111,49	Tidak Efisien

Sumber : Hasil Penelitian Diolah.

Berdasarkan data tersebut, hal yang menyebabkan presentase efisiensi ini tidak efisien selama 3 (tiga) tahun berturut – turut karena penggunaan realisasi anggaran belanja begitu

besar, dimana pada tahun 2018 anggaran yang direalisasikan sebesar Rp. 5.789.369.137 dari Rp 6.765.785.000 yang dianggarkan. Ditahun 2019 anggaran yang direalisasikan sebesar Rp. 25.577.519.853 dari Rp 27.632.395.056 yang dianggarkan. Ditahun 2020 anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 20.536.116.705 dari Rp 22.894.718.330 yang dianggarkan. Jika dilihat dari penggunaan realisasi anggaran belanja tiap tahunnya, pengelolaan anggaran belanja ini belum berhasil memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai sasaran.

Anggaran pada tahun 2020 lebih kecil daripada tahun 2019 namun lebih besar tahun 2018, hal ini juga dapat mempengaruhi jumlah daripada program/kegiatan yang mendukung pencapaian target dalam Perjanjian Kinerja.

Menurut Menurut Prasetyo, W. H & Nugraheni, A. P (2020:6) menghitung efisiensi penyerapan anggaran maka harus membandingkan membandingkan anggaran belanja dinas dengan realisasinya. Apabila dari perbandingan tersebut menghasilkan presentasi antara 60% sampai 80% maka dikatakan efisien. Namun apabila hasil dari perbandingan menunjukkan presentase 100% lebih maka dapat diartikan bahwa penyerapan anggaran tidak efisien.

Supaya pelaksanaan anggaran efisien diperlukan perbaikan perencanaan program dan kegiatan dan estimasi penggunaan anggaran yang mengacu pada perbandingan data dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan anggaran belanja pada tahun anggaran 2018 dan 2020 dilihat dari analisis efektivitas pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dinilai cukup efektif, sedangkan pada tahun anggaran 2019 dinilai efektif sehingga hipotesis pertama diterima.
2. Pelaksanaan anggaran belanja pada tahun anggaran 2018 s/d 2020 dilihat dari analisis efisiensi pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dinilai tidak efisien, sehingga hipotesis kedua ditolak.

Saran

- 1 Meningkatkan koordinasi antara pihak yang mengambil kebijakan dengan pihak yang melaksanakan kebijakan untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas penyerapan anggaran. Dengan adanya koordinasi antar pihak pengambil keputusan dengan pihak yang melaksanakan tugas maka pihak – pihak pelaksana tugas dapat menjalankan tugas sesuai dengan arahan dan tujuan yang hendak dicapai. Apabila koordinasi belum berjalan dengan baik maka mengakibatkan program - program yang direncanakan tidak berjalan dengan baik. Tidak berjalannya program atau kegiatan tersebut akan berdampak pada kinerja dinas yang terlihat di rasio efektivitas dan efisiensi anggaran Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
- 2 Melaksanakan evaluasi untuk meninjau penyebab tidak efisien dan efektifnya penyerapan anggaran belanja. Setiap tahun diharapkan diadakan evaluasi mengenai program – program yang tidak berjalan dengan baik. Dengan adanya evaluasi tersebut diharapkan ada perbaikan yang dilakukan untuk mencapai kriteria efektif dan efisien dari segi pelaksanaan anggaran Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

REFERENCES

- Anonim. 2004. *Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- _____. 2014. *Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- _____. 2010. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Abdul, H., Muhammad, S. K. 2019. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- _____. 2019. *Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Prasetyo, W Heri.2020. *Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Magelang Periode 2015 – 2019*. Jurnal. Vol : 11 No : 1 Tahun 2020 e- ISSN: 2614 – 1930. Universitas Tidar Magelang Jawa Tengah
- Surjaweni, V Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.